



**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**TAHUN  
2017**

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

→ JALAN CIMUNCANG NO. 21D BANDUNG

☎ 022-87832124 FAX. 022-87832125

✉ [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, selain menguraikan capaian kinerja Tahun 2017 juga menguraikan tentang Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, Pengadilan Tinggi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini dapat tersusun.

Kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparaturnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

**KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT,**



**ARWAN BYRIN, SH., MH.**  
**NIP. 195208081980031001**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding dan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Dalam pencapaian Visi tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempunyai tujuan:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) sasaran kinerja utama yang dijabarkan dalam suatu analisis akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berisi realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar **96.40%** sedangkan persentase capaian serapan anggaran untuk DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum adalah sebesar **92.48%**.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
A.    Latar Belakang .....	6
B.    Tugas Pokok dan Fungsi Instansi .....	8
C.    Dasar Hukum Penyusunan LKjIP .....	9
D.    Sistematika Penyajian Laporan .....	9
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A.    Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.....	11
B.    Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 .....	16
C.    Rencana Kinerja Tahun 2017 .....	19
D.    Penetapan Kinerja Tahun 2017 .....	19
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A.    Akuntabilitas Kinerja .....	21
1.    Pengukuran Kinerja Kegiatan .....	21
2.    Pengukuran Pencapaian Sasaran .....	23
B.    Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	24
1.    Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .....	24
2.    Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	27
C.    Akuntabilitas Keuangan .....	32
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
A.    Keberhasilan .....	32
B.    Hambatan / Masalah .....	32
C.    Rekomendasi.....	32
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.	Jumlah Pegawai.....	6
2.	Wilayah Hukum.....	7
3.	Reviu Renstra Tahun 2015-2019.....	14
4.	Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.....	16
5.	Rencana Kinerja Tahun 2017.....	19
6.	Penetapan Kinerja Tahun 2017.....	20
7.	Pengukuran Kinerja Kegiatan.....	22
8.	Pengukuran Kinerja Sasaran.....	23
9.	Pengukuran Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan, akuntabel.....	24
10.	Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan.....	25
11.	Prosentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	25
12.	Prosentase Penurunan Sisa Perkara.....	26
13.	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, PK.....	26
14.	Prosentase Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	27
15.	Prosentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.....	28
16.	Prosentase Putusan Perkara Tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari.....	28
17.	Alokasi DIPA Tahun 2017.....	29
18.	Alokasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2017.....	29
19.	Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2017.....	30
20.	Alokasi DIPA DITJEN BADILUM Per Jenis Belanja Tahun 2017.....	30
21.	Realisasi DIPA DITJEN BADILUM Per Jenis Belanja Tahun 2017.....	31

**DAFTAR GRAFIK**

<b>No.</b>	<b>Nama Grafik</b>	<b>Hal.</b>
1.	Pagu DIPA BUA Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017.....	29
2.	Pagu DIPA BADILUM Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017.....	30

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Jawa Barat membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Sebelum Pengadilan Tinggi Jawa Barat dibentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Pengadilan Tinggi Jawa Barat meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten.

Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat terletak di Jalan Cimuncang No. 21 D Bandung dengan luas tanah 4.000 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 3.026,60 M<sup>2</sup> namun belum diresmikan.

Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2017, jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Pegawai**

No	Tenaga Teknis	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Ketua	1	Aktif
2	Wakil Ketua	1	Aktif
3	Hakim Tinggi	33	Aktif
4	Hakim Ad Hoc Tipikor	7	Aktif
5	Hakim Yustisial	4	Tidak Aktif
6	Panitera	1	Aktif

7	Sekretaris	1	Aktif
8	Wakil Panitera	1	Aktif
9	Panitera Muda	3	Aktif
10	Kabag / Kepala Sub Bagian	6	Aktif
11	Panitera Pengganti	32	Aktif
12	Staf Pelaksana	28	Aktif
Jumlah		118	

Untuk tenaga kontrak atau pekerja tidak tetap di Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah berjumlah 18 (delapan belas) orang, terdiri dari 4 (empat) orang tenaga *security/satpam*, 4 (empat) orang tenaga supir dan 10 (sepuluh) orang tenaga pramusaji.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat meliputi 18 (delapan belas) Pemerintah Kabupaten dan 9 (sembilan) Pemerintah Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang wilayah hukumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Wilayah Hukum**

No	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
2	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung	Kota Bandung
3	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi	Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
4	Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi
5	Pengadilan Negeri Kelas I B Bogor	Kota Bogor
6	Pengadilan Negeri Kelas I B Sukabumi	Kota Sukabumi
7	Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur	Kabupaten Cianjur
8	Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang	Kabupaten Karawang
9	Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya
10	Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu	Kabupaten Indramayu
11	Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon	Kota Cirebon
12	Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong	Kabupaten Bogor
13	Pengadilan Negeri Kelas I B Sumber	Kabupaten Cirebon
14	Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta	Kabupaten Purwakarta
15	Pengadilan Negeri Kelas I B Cibadak	Kabupaten Sukabumi
16	Pengadilan Negeri Kelas I B Depok	Kota Depok
17	Pengadilan Negeri Kelas I B Garut	Kabupaten Garut

18	Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis	Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran
19	Pengadilan Negeri Kelas II Kuningan	Kabupaten Kuningan
20	Pengadilan Negeri Kelas II Majalengka	Kabupaten Majalengka
21	Pengadilan Negeri Kelas I B Subang	Kabupaten Subang
22	Pengadilan Negeri Kelas I B Sumedang	Kabupaten Sumedang

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu dimana setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut terlihat dari luas wilayah kerja yang ditangani terutama pada Pengadilan Negeri Bekasi yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten, Pengadilan Negeri Bale Bandung yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten, Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten dan Pengadilan Negeri Ciamis yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten.

Disamping hal tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah mengusulkan kenaikan kelas untuk setiap Pengadilan tingkat pertama di wilayah Jawa Barat.

#### B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Pengadilan Tinggi Jawa Barat merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagaimana Pengadilan Tinggi lainnya mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding yang masuk.

Adapun fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Barat antara lain :

1. **Fungsi mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat banding.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya :**
7. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
8. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

#### **C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

#### **8. Sistematika Penyajian Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**BAB I**                      Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan tentang LKjIP, yang dituangkan

	dalam a. Latar Belakang, b. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, c. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP, dan d. Sistematika Penyajian Laporan.
BAB II	Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tahun anggaran 2017 yang berisikan antara lain a. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Jawa Barat, b. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017, dan c. Penetapan Kinerja Tahun 2017, dan d. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang dipaparkan dalam a. Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan c. Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	Penutup, menguraikan a. Keberhasilan, b. Hambatan/Masalah, c. Pemecahan Masalah
LAMPIRAN	Terdiri dari : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, S.K. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU), S.K. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Jawa Barat, S.K. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Rencana Kinerja Tahun 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Penetapan Kinerja Tahun 2017, S.K. Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, S.K. Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Jawa Barat, S.K. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, SK. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan 2018, Pernyataan Telah Direviu, Checklist Reviu.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung R.I yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Peradilan Tingkat Banding dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana visi Mahkamah Agung RI yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat Yang Agung".

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tinggi Jawa Barat juga membawa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

5. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
7. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
8. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
  - a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan.

- b. Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Presentase Presentase Penurunan Sisa Perkara
- d. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasai, PK
- e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
- b. Presentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan.

Adapun Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Meng-*upload* perkara ke *website*.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan melaksanakan pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor W11.U/132/OT.01.2/XI/2017 tanggal 13 November 2017 Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 3. Tabel Reviu Renstra 2015-2019

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGALUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	85%	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84%	86%	88%	90%	92%
2	SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENGUNGKAU BADAN PERADILAN	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%	5%	5%	10%	15%
					d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	60%	60%	65%	70%	75%
					- Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
					- PK	80%	82%	84%	88%	90%
					e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
					a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	0%	100%	100%

Strategis								
Program	Kegiatan	Indikator	Target	Matriks Pendanaan (Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	100%	25,127,534,000	32,045,874,000	34,660,066,000	32,404,081,000	35,644,489,100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	PRESENTASE INDEKS KEPUASAN PENCARI KEADILAN	100%	517,970,000	436,530,000	520,060,000	1,105,000,000	1,215,500,000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	4,917,500,000	110,000,000	273,750,000	589,865,000	648,851,500

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor W11.U/4009/OT.01.2/XI/2017 tanggal 13 November 2017 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{JUMLAH SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN}}{\text{JUMLAH SISA PERKARA YANG HARUS}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG ADA}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1-Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum  ————— X 100%  Jumlah Putusan Perkara </div> Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responded Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN </div> Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	<b>PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA</b>	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <math display="block">\frac{\text{JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU}}{\text{JUMLAH PUTUSAN}} \times 100\%</math> </div> Catatan: • SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <math display="block">\frac{\text{JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YANG DI UPLOAD DALAM WEBSITE}}{\text{JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DIPUTUS}} \times 100</math> </div> Catatan: • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**A. Rencana Kinerja Tahun 2017**

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2017**

Sasaran			Target
No.	Uraian	Indikator	2017
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	65% 100%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	84%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	0%

**B. Penetapan Kinerja Tahun 2017**

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Penetapan Kinerja Tahun 2017**

Sasaran			Target
No.	Uraian	Indikator	2017
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	65% 100%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	84%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	0%

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

#### 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (sesuai rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2017		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	103.13%	103.13%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	87.16%	99.05%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%	3.03%	75.75%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	65% 100%	62.11% 99.00%	95.55% 99.00%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	84%	82.97	98.77%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100.00%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	0%	0%	0%

## 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut:

**Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2017		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	103.13%	103.13%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%	87.16%	99.05%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%	3.03%	75.75%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasai - PK	65% 100%	62.11% 99.00%	95.55% 99.00%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	84%	82.97	98.77%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100.00%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	0%	0%	0%

Pengukuran Pencapaian Sasaran memiliki nilai yang sama dengan pengukuran Kinerja Kegiatan dikarenakan Penetapan Kinerja Tahun 2017 mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2017 dengan target yang sama.

**B. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table di atas, untuk mencapai sasara yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Tansparan dan Akuntabel**

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Pengukuran Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2017		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	98%	103.13%	103.13%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	87.16%	99.05%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	98%	3.03%	75.75%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	65% 100%	62.11% 99.00%	95.55% 99.00%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	84	82.97	98.77%

**a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Tahun 2017, sisa perkara pidana, pidana anak, perdata dan Tipikor tahun lalu sebanyak 165 perkara, perkara yang masuk sebanyak 1081 perkara, perkara yang putus sebanyak 1086 perkara, sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan sebanyak 165 perkara, sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 160 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan Tahun 2017 diperoleh dari jumlah sisa perkara yang diselesaikan/diputus Tahun 2016 yaitu 165 perkara dibagi dengan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 yaitu 160 perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara yang dapat diselesaikan selama Tahun 2017 adalah 103.13 %.



**Tabel 10. Presentase sisa perkara yang diselesaikan**

No.	Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017				
		Sisa Perkara	Masuk	Putus	Sisa Perkara Tahun 2016 yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan
1	Pidana Umum	39	386	388	39	37	105.41%
2	Pidana Anak	6	55	60	6	1	133.33%
3	Perdata	116	606	606	116	116	100.00%
4	Tipikor	4	34	32	4	6	95.35%
	<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>1081</b>	<b>1086</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>103.13%</b>

**b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Persentase perkara yang diselesaikan Tahun 2017 adalah 87,16 % yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada yaitu jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan 100% sehingga Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 87,16%.

**Tabel 11. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

No.	Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017			
		Sisa Perkara	Masuk	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu
1	Pidana Umum	39	386	388	425	91.29%
2	Pidana Anak	6	55	60	61	98.36%
3	Perdata	116	606	606	722	83.93%
4	Tipikor	4	34	32	38	84.21%
	<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>1081</b>	<b>1086</b>	<b>1246</b>	<b>87.16%</b>

**c. Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2017 adalah sebesar 3,03% yaitu perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya (tn.1) dikurangi sisa perkara tahun berjalan (tn) dibagi sisa perkara tahun sebelumnya (tn.1) dikalikan 100 % sehingga Persentase penurunan sisa perkara tahun 2017 adalah sebesar 3,03%.

**Tabel 12. Presentase Penurunan sisa perkara**

No.	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2016	Sisa Perkara Tahun 2017	Presentase Penurunan Sisa Perkara
1	Pidana Umum	39	37	5.13%
2	Pidana Anak	6	1	83.33%
3	Perdata	116	116	0.00%
4	Tipikor	4	6	-50.00%
	Jumlah	165	160	3.03%

**d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, PK**

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 659 Perkara dari 1061 Perkara Putus Banding sehingga prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 659 perkara dibagi jumlah putusan perkara banding sebanyak 1061 perkara dikalikan 100% sehingga prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 62.11%.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 398 Perkara dari 402 Perkara Putus Kasasi sehingga prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 398 perkara dibagi jumlah putusan perkara kasasi sebanyak 402 perkara dikalikan 100% sehingga prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 99.00%.

**Tabel 13. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, PK**

No	Nama Pengadilan	Putus	Banding	Kasasi	PK	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	74026	84	13	0	73942	71	13	84.52%	100.00%
2	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	5719	173	158	2	5546	15	156	8.67%	98.73%
3	PENGADILAN NEGERI BEKASI	11427	173	33	1	11254	140	32	80.92%	96.97%
4	PENGADILAN NEGERI BOGOR	103534	61	17	0	103473	44	17	72.13%	100.00%
5	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	35067	21	5	0	35046	16	5	76.19%	100.00%
6	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	605	42	12	0	563	30	12	71.43%	100.00%
7	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	21513	46	16	0	21467	30	16	65.22%	100.00%
8	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	78024	85	18	0	77939	67	18	78.82%	100.00%
9	PENGADILAN NEGERI CIREBON	2912	35	18	0	2877	17	18	48.57%	100.00%
10	PENGADILAN NEGERI DEPOK	5447	76	10	0	5371	66	10	86.84%	100.00%
11	PENGADILAN NEGERI GARUT	1587	21	5	0	1566	16	5	76.19%	100.00%

12	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	5153	33	11	0	5120	22	11	66.67%	100.00%
13	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	882	38	15	0	844	23	15	60.53%	100.00%
14	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	19808	17	8	0	19791	9	8	52.94%	100.00%
15	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	30863	13	5	0	30850	8	5	61.54%	100.00%
16	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	39236	21	10	0	39215	11	10	52.38%	100.00%
17	PENGADILAN NEGERI SUBANG	38297	26	11	0	38271	15	11	57.69%	100.00%
18	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	18308	18	6	0	18290	12	6	66.67%	100.00%
19	PENGADILAN NEGERI SUMBER	35604	24	9	1	35580	15	8	62.50%	88.89%
20	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	15612	18	4	0	15594	14	4	77.78%	100.00%
21	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	51076	36	18	0	51040	18	18	50.00%	100.00%
	Total	835882	1061	402	4	593639	659	398	62.11%	99.00%

**e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi**

Persentase Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi adalah sebesar **82.97** berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor:36/DJU/OT.01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

**2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Pencapaian peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14. Pengukuran Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2017		
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	0%	0%	0%

Untuk pengukuran kinerja peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara berdasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut:

**a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu yaitu jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju yaitu sebanyak 1.086 Perkara dibagi jumlah putusan sebanyak 1.086 Perkara di kali 100% adalah sebesar 100%

**Tabel 15. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

No.	Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017			
		Sisa Perkara	Masuk	Putus	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
1	Pidana Umum	39	386	388	388	100.00%
2	Pidana Anak	6	55	60	60	100.00%
3	Perdata	116	606	606	606	100.00%
4	Tipikor	4	34	32	32	100.00%
	<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>1.081</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>	<b>100.00%</b>

**b. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari**

Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari yaitu Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di upload dalam website Menarik Perhatian Masyarakat sebanyak 0 perkara dibagi Jumlah Perkara Tipikor Menarik Perhatian Masyarakat Yang Di Putus sebanyak 0 perkara di kali 100% adalah sebesar 0%.

**Tabel 16. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari**

Tahun 2017				
No.	Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di upload dalam website	Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di upload dalam website Menarik Perhatian Masyarakat	Jumlah Perkara Tipikor Menarik Perhatian Masyarakat Yang Di Putus	Presentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses dalam waktu 1 Hari setelah diputus
1	32	0	0	0.00%
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

### C. Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima 2 (dua) sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).

**Tabel 17. Alokasi DIPA Tahun 2017**

No.	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jumlah DIPA
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA- 005.01.2.097500/2017	7 Desember 2015	32.155.874.000
2.	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA- 005.03.2.099067/2017	7 Desember 2015	436.530.000

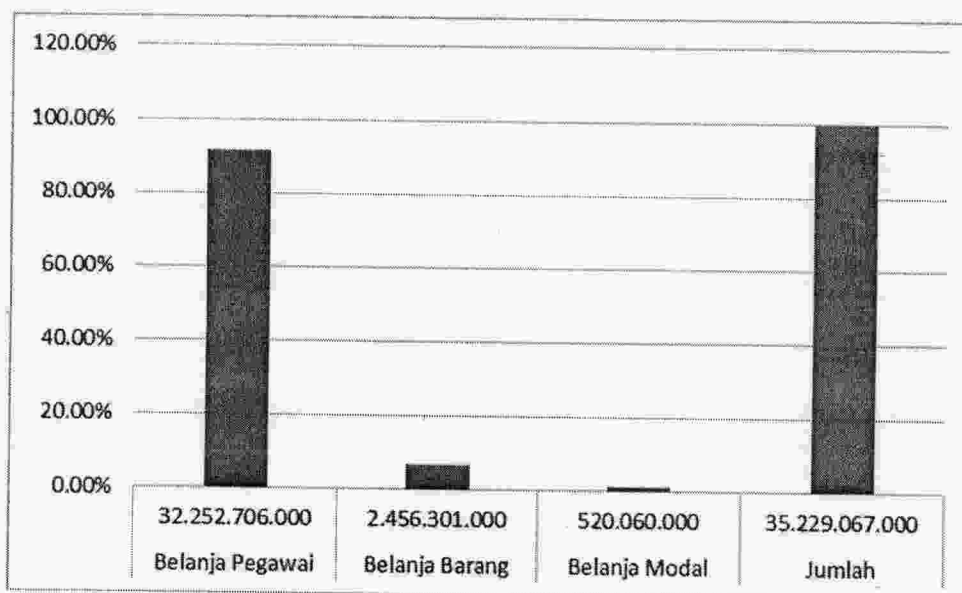
#### 1. DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (005.01)

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-005.01.2.097500/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebesar Rp 35.229.067.000,- (*Tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 18. Alokasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2017**

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Pegawai	32.252.706.000	91.55%
Belanja Barang	2.456.301.000	6.97%
Belanja Modal	520.060.000	1.48%
<b>Jumlah</b>	<b>35.229.067.000</b>	<b>100.00%</b>

**Grafik 1. Pagu Dipa Bua Pengadilan Tinggi Jawa Barat  
Tahun Anggaran 2017 (Berdasarkan Jenis Belanja)**



Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebesar Rp 33,961,437,806 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) atau 96.40%, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 19. Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2017**

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Pegawai	32.252.706.000	31.130.037.340	91.66%
Belanja Barang	2.456.301.000	2.321.803.466	6.84%
Belanja Modal	520.060.000	509.597.000	1.50%
<b>Jumlah</b>	<b>35.229.067.000</b>	<b>35.229.067.000</b>	<b>96.40%</b>

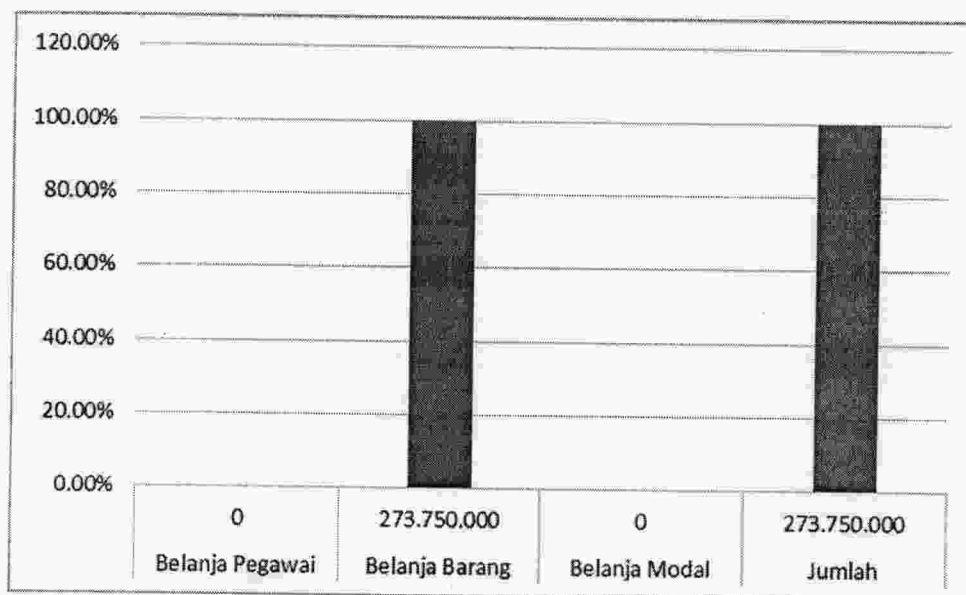
## 2. DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)

DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2017 SP DIPA-003.01.2.097500/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Jawa Barat hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp. 273.750.000,- (*dua ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

**Tabel 20. Alokasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2017**

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Pegawai	0	0.00%
Belanja Barang	273.750.000	100.00%
Belanja Modal	0	0.00%
<b>Jumlah</b>	<b>273.750.000</b>	<b>100.00%</b>

**Grafik 2. Pagu Dipa Ditjen Badilum Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 (Berdasarkan Jenis Belanja)**



Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebesar Rp 253.175.740,- (*dua ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) atau 92.48 %.

**Tabel 21. Realisasi DIPA Ditjen Badilum**  
**Per Jenis Belanja Tahun 2017**

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Pegawai	0	0	0.00%
Belanja Barang	253.175.740	253.175.740	92.48%
Belanja Modal	0	0	0.00%
<b>Jumlah</b>	<b>253.175.740</b>	<b>253.175.740</b>	<b>92.48%</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Keberhasilan**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara pidana perdata dan tipikor maupun perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur) dari Pengadilan Negeri se-wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai Pengadilan tingkat banding, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum. Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain:

1. Pelayanan informasi peradilan dengan menyediakan Meja Informasi dan penerapan sistem penelurusan perkara (SIPP).
2. Penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan Meja Pengaduan.

#### **B. Hambatan / Masalah**

1. Keterbatasan anggaran baik menyangkut anggaran program layanan perkantoran maupun anggaran program perlengkapan sarana dan prasarana peradilan
2. Terdapat beberapa pengadilan negeri yang memiliki wilayah hukum beberapa kabupaten/kota dan kelasnya tidak sebanding dengan beban perkara yang harus ditangani.
3. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh bagian/unit kerja pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sehingga kegiatan atau rencana tidak dapat direalisasikan/dilaksanakan.
4. Perlu dibentuknya Pengadilan Tingkat Pertama pada daerah Kabupaten, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

#### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan keberhasilan dan hambatan tersebut, maka untuk mengatasi kendala kendala dalam pelaksanaan tersebut tugas – tugas dan fungsi diperlukan langkah-langkah diantaranya:

1. Mengupayakan penambahan alokasi anggaran baik anggaran layanan perkantoran maupun anggaran peningkatan sarana dan prasarana (belanja modal) agar tidak menghambat proses penanganan perkara.
2. Mengusulkan kenaikan kelas beberapa pengadilan dan mendatang dibutuhkan pengadilan baru untuk kab Bandung barat, kab tasikmalaya, dan kab. Pangandaran.

3. Mendorong komitmen bersama untuk menghasilkan LKjIP sebagai instrument pelengkap dalam melakukan evaluasi kinerja.

Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.

Serta bagi organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, LKjIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

**LAMPIRAN:**

1. SK. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sesuai Perma No.7 Tahun 2015
3. Matriks Pengukuran Kinerja per Triwulan Tahun 2017
4. Penghargaan-Penghargaan
5. Pernyataan Telah Direviu
6. Checklist Reviu



# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

JL.CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG40125  
Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125  
Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)  
Email: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: W11.U/ 49 /OT.01.2/II/2018

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

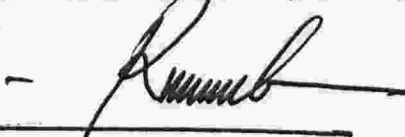
#### KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
  - Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Jawa Barat perlu membentuk Tim Penyusunan laporan tersebut;
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
- Pertama :** Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Kedua :** Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Ketiga :** Setiap perkembangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : BANDUNG  
✓ Pada Tanggal : Februari 2018  
KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT



H. ARWAN BYRIN, SH., MH.  
NIP. 195208081980031001

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**  
**NOMOR: W11.U/ 49 /OT.01.2/II/2018**  
**TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM LAKIP SEBAGAI
1.	H. ARWAN BYRIN, SH., MH. NIP. 195208081980031001	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Penanggung Jawab/ Ketua
2.	H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH. NIP. 195403141984031010	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Penanggung Jawab/ Wakil Ketua
3.	ANSHORI THOYIB, SH., M. Hum. NIP. 195607051979031009	Panitera	Koordinator Tim Bidang Kepaniteraan
4.	Drs. SUBARJI, SH. NIP. 196006011991031002	Sekretaris	Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan
5.	Drs. YOYO NIP. 19600316 198211 1 001	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
6.	Drs. BARNAS, SH NIP. 19660617 198502 1 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H., M.H. NIP. 195811301981031007	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	Hj. R IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. NIP. 195906081985022001	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	H. NANANG PRIATNA, SH NIP. 19621010 199203 1 007	Panitera Muda Tipikor	Anggota
10.	MARDONO, SH. MH. NIP. 19621109 198303 1 008	Panitera Muda Perdata	Anggota
11.	SRI SURATNO WIBOWO, ST NIP. 19730306 200604 1 002	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha	Anggota
12.	ARY FARIDAH, S. Si. NIP. 197611092006041002	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
13.	DANI ADHIA WARDANA, ST NIP. 19770729 200502 1 002	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
14.	UMMI HANI, S. Sos. NIP. 19751230 200604 2 001	Kepala Sub Bagian Kepegawian dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	ANTON SENJAYA, S.Kom., SH NIP. 19810222 200604 1 005	Staf Panitera Muda Hukum	Anggota
16.	FITRI KRISTIANI, SE., Ak NIP. 19830626 200604 2 004	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
17.	EPPI AFRIANDI P, A.Md. NIP. 197704162009041005	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota

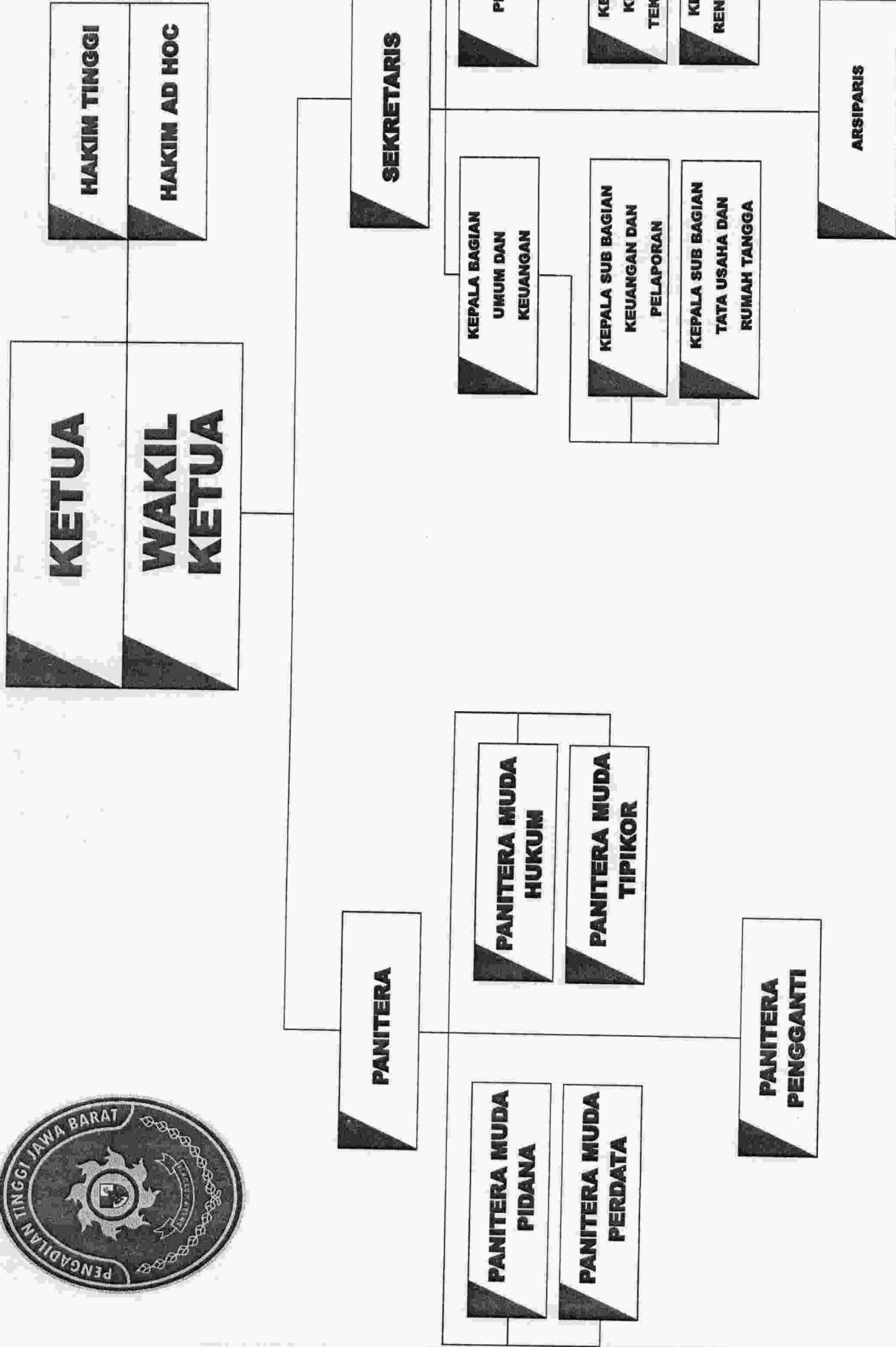
Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : Februari 2018  
**KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**



H. ARWAN BYRIN, SH., MH.  
NIP. 195208081980031001





**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**





# PENGHARGAAN-PENGHARGAAN



## Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM.02/QMR / SERTIFIKAT / 12 / 2016

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tipe A  
Alamat : Jl. Surapati No. 47, Bandung

Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2019, dengan rencana audit surveillance pada :

I. Juni 2017

II. Desember 2017

III. Juni 2018

IV. Desember 2018

V. Juni 2019



VI. Desember 2019

Ketua Tim Akreditasi  
Penjaminan Mutu

WAHYUDIN

Direktur Jenderal  
Peradilan Umum

HERRI SWANTORO



Certificate QMS-IND/10888  
The management system of

## ISO 9001 : 2015

has been assessed and certified as meeting the requirements of

For the following activities:  
Public Administration Activities of Ministry of Youth Affairs and Sports for Youth Entrepreneurship Empowerment

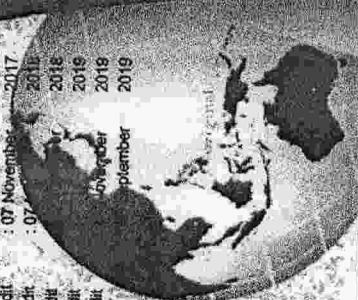
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001 : 2015 requirements may be obtained by the organization

This certificate is granting from 07 November 2018 until 07 November 2019  
Issue 01

Authorized by

Signed of behalf of ICSM Indonesia  
Main Assessment by ICSM Indonesia : 31 October 2016  
Planning to be 1<sup>st</sup> Surveillance Audit : 07 November 2017  
Planning to be 2<sup>nd</sup> Surveillance Audit : 07 November 2018  
Planning to be 3<sup>rd</sup> Surveillance Audit : 2019  
Planning to be 4<sup>th</sup> Surveillance Audit : 2019  
Planning to be 5<sup>th</sup> Surveillance Audit : 2019  
Planning to be 1<sup>st</sup> Renewal Audit : 2019

ICSM Indonesia - Certification Services  
Unit 101  
Jl. Raya Sekeloa Utara No. 11  
Jakarta 14180 Indonesia  
Phone : (021) 961 1270  
Fax : (021) 961 1265  
www.icsm.co.id





# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

JL. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125

Telp. (022). 87832124 Fax (022). 87832125

Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)

Email: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

## PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

## TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandung, Februari 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

ARWAN BYRIN, SH., MH.

NIP. 195208081980031001

## CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah Menyajikan Akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7 LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		5 IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10 IKU dan IK telah SMART	✓

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

✈ JALAN CIMUNCANG NO. 21D BANDUNG

☎ 022-87832124 FAX. 022-87832125

✉ [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)